

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK
BUDI ASIH DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**GHOZALI SYAFRI ADRI YUNUS
NPM 1916021055**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI ASIH DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

Oleh

GHOZALI SYAFRI ADRI YUNUS

Anak yang ditelantarkan baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh orang tua/keluarganya dengan berbagai alasan membuat anak tidak mendapatkan hak-hak untuk tumbuh kembang, pendidikan maupun pelayanan kesehatan secara wajar. Program penanganan anak terlantar pada 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa sudah cukup menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan banyaknya anak yang berhasil memberdayakan dirinya untuk masuk ke perguruan tinggi maupun pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program penanganan anak terlantar pada UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan berfokus pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yakni melihat keberhasilan implementasi dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah ditemukan dalam program penanganan anak terlantar khususnya pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial telah terimplementasi dengan baik dengan terpenuhinya informasi yang didapatkan baik oleh anak dan implementor program secara jelas, terpenuhinya watak dan karakteristik yang baik/tegas oleh implementor program dalam memberikan pelayanan kepada anak, serta tersistematisnya pelaksanaan kegiatan yang berdasar pada standar operasional prosedur terkait prosedurnya, waktunya, maupun pengawasannya pada saat pelaksanaan kegiatan. Namun, pada masing-masing sub program belum terpenuhinya pada aspek sumber daya baik secara kelayakan maupun jumlah barang/nominalnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan program penanganan anak terlantar di masing-masing sub program.

Kata Kunci : Implementasi, Anak Terlantar, UPTD PSAA Budi Asih

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF NEGLIGATE CHILDREN'S HANDLING PROGRAM IN REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTING UNIT OF SOCIAL INSTITUTE FOR CHILDREN OF BUDI ASIH SOCIAL OFFICE OF LAMPUNG PROVINCE

By

GHOZALI SYAFRI ADRI YUNUS

Children who are neglected either intentionally or unintentionally by their parents/family for various reasons prevent the child from getting the rights to proper development, education and health services. The neglected children handling program in 2019, 2020 and 2021 shows that it has shown significant success with many children succeeding in empowering themselves to enter college or work. This study aims to determine the implementation of the neglected children handling program at the UPTD PSAA Budi Asih Social Service of Lampung Province.

The research method used is qualitative research with a descriptive type and focuses on the theory of policy implementation from George C. Edward III, namely looking at the successful implementation of the variables of communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures. Data collection techniques in the form of observation techniques, interviews, and documentation.

The results of research that have been found in neglected children handling programs, especially in the protection sub-program, parenting sub-program, and social service sub-program have been implemented properly by fulfilling the information obtained by both the child and the program implementor clearly, fulfilling good character and characteristics/ strictly by the program implementor in providing services to children, as well as the systematic implementation of activities based on standard operating procedures regarding the procedures, timing, and supervision during the implementation of activities. However, each sub-program has not been fulfilled in terms of resources both in terms of eligibility and the amount of goods/nominal to support the implementation of neglected children handling program activities in each sub-program.

Keywords: Implementation, Abandoned Children, UPTD PSAA Budi Asih

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK
BUDI ASIH DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

GHOZALI SYAFRI ADRI YUNUS

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN
PENANGANAN ANAK TERLANTAR
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI ASIH
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Ghozali Syafri Adri Yunus

No. Pokok Mahasiswa

: 1916021055

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si
NIP. 196007291990101001

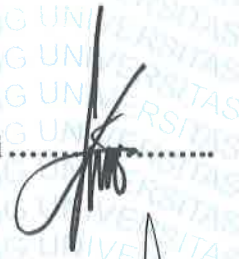
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M. IP.
NIP. 196112181989021001

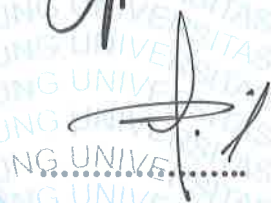
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si



Penguji Utama : Drs. Ismono Hadi, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Ida Nurhida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghozali Syafri Adri Yunus

NPM : 1916021055

Program Studi : S1-Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK
TERLANTAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI
ASIH DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain atau plagiat kecuali yang secara tertulis dipacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka, dan bila nanti ada plagiat, maka penulis bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Ghozali Syafri Adri Yunus
NPM 1916021055

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ghozali Syafri Adri Yunus lahir di Tanung Karang, 28 Desember 2000. Pendidikan formal yang telah diselesaikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. SD IT Insan Mulia Terpadu Kotagajah lulus pada tahun 2011
2. Mts Ma'arif 02 Kotagajah lulus pada tahun 2016
3. SMA N 1 Kotagajah lulus pada tahun 2019

Tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022 peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Rawa Betik, Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah, serta melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung.

MOTTO HIDUP

“Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan seluruh alam”

(Q.S. Al-An'am Ayat 162)

“Jika kau masih melakukan perbuatan dosa dan melakukan kerusakan yang
lain maka jagalah shalat anda agar terdapat harapan ampunan dosa”

(Ali Saleh Mohammed Ali Jaber atau Syeikh Ali Jaber)

“Membantu orang lain itu pada akhirnya akan berujung demi diri sendiri juga”

(Kamado Tanjiro)

“Jadilah seperti mata air yang selalu berpengaruh terhadap sekelilingnya, jika
engkau keruh maka sekelilingmu juga keruh, dan jika kau jernih maka
sekelilingmu juga jernih”

(Ghozali Syafri Adri Yunus)

PERSEMBAHAN



Puji Syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua orang tuaku ayah dan bunda tercinta

Serta kakak dan adikku tersayang

Gilang Rahman Adri Yunus, S.Sos dan Hanifah Adinda Syafitri Adri Yunus

Terima Kasih untuk segala dukungan dan doa terbaik yang telah diberikan selama ini kepada saya, semoga amal kebajikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Almamater tercinta Universitas Lampung

UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Penanganan Anak Terlantar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung”**. Sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si sebagai dosen pembimbing dan Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si sebagai dosen pembahas. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, waktu, motivasi, dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Darmawan Purba., S.IP., M.IP., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam berjalannya kuliah dan proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Drs. Eko Priono, MM selaku Kepala UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung beserta staff dan jajarannya yang memberikan izin dan bantuan selama penelitian.
7. Keluarga besar M. Faried Yunus dan keluarga besar Hi. Amirino yang telah memberikan saya kebahagiaan serta canda dan tawa sejak saya dilahirkan.
8. Ayah Adriyanto Yunus, Bunda Anita, Ahi Gilang Rahman Adri Yunus, dan Adik saya Hanifah Adinda Syafitri Adri Yunus terima kasih saya ucapkan kepada merekalah saya mengerti arti dari kebahagiaan, canda, tawa, emosi, tangisan, sedih, dan rasa berjuang yang pantang mundur dari kehidupan yang fana ini untuk dapat menyelesaikan dari apapun yang telah saya mulai.
9. Sandria Savitri, Sali, dan Meng terimakasih telah menemaniku dalam perjalanan menciptakan skripsi yang hebat ini. Sandria Savitri sesosok wanita yang kusayangi, Sali makhluk berjenis tembok yang menjadi kisah perjalananku mendekati wanita yang kusayangi, dan Meng hewan yang sangat random dan galak. Terimakasih kuucapkan kepada kalian, *i'm loving you all*.
10. Sahabat-sahabat yang tercinta, Ade Utama Jaya, S.I.P., Arrofi Aditya, S.I.P., Muhammad Rizki, Nando Ajie Rifa'ie, Raffi Muzzafhar, Rahmad Edi Saputra, Renanda Ari Wibowo, Ricky Okta Setiawan, dan Tommy Hidayat, SE,.. Terima kasih karena sudah selalu menjadi sahabat terbaik di masa-masa yang telah saya lalui, tempat saya berkeluh kesah, dan menjadi saksi perkembangan diri yang terbaik.

11. Sahabat-sahabat ‘OT Pride’ yang hebat, Aldi Darmawan, S.I.P., Farhan Nur Fikri, S.I.P., Muhammad Rizki, Nando Ajie Rifa’ie, dan Taufiqie M. Zidane. Terima kasih atas tawa, canda, wejangan. dan SKS mengenai kehidupan dewasa ini.
12. Sahabat-sahabat ‘Mastar’ yang terbaik, Agung Andrea Wijayanto, S.I.P., Arrofi Aditya, S.I.P., Aqiel Siradj, S.I.P., Farel Pramudyo Duto, S.I.P., Muhammad Rizki, dan Nando Ajie Rifa’ie. Terima kasih atas tawa, canda yang diberikan semasa saya tidak mempunyai teman dekat sedari maba hingga saat ini.
13. Sahabat pejuang MBKM ‘Trio Budi Asih’ Muhammad Rizki dan Nando Ajie Rifa’ie serta ‘Duo PSBR Radin Intan’ Fitri Handayani dan Yoga Irfanda. Terima kasih atas bantuan, masukan dan pengalaman magang terbaik di Dinas Sosial Provinsi Lampung.
14. Keluarga besar UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung yang sudah sangat baik menerima kedatangan saya dan membantu dalam penyelesaian skripsi.
15. Semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Bandar Lampung, Juni 2023
Peneliti

Ghozali Syafri Adri Yunus
NPM. 1916021055

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN.....	i
SANWACANA.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.1.2 Jenis Kebijakan Publik.....	11
2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik.....	13
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.2.2 Tahapan Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi.....	19
2.3 Tinjauan Tentang Program Penanganan Anak Terlantar.....	26
2.3.1 Definisi Program Penanganan Anak Terlantar.....	26
2.3.2 Tujuan Program Penanganan Anak Terlantar.....	27
2.3.3 Jenis-jenis Program Penanganan Anak Terlantar.....	27
2.4 Kerangka Pikir.....	29
III. METODE PENELITIAN.....	31

3.1	Tipe Penelitian.....	31
3.2	Fokus Penelitian	31
3.3	Lokasi Penelitian	35
3.4	Jenis Data	35
3.5	Informan	38
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7	Teknik Pengolahan Data	42
3.8	Teknik Analisis Data.....	43
IV.	GAMBARAN UMUM	46
4.1	Gambaran Umum UPTD PSAA Budi Asih	46
4.1.1	Sejarah UPTD PSAA Budi Asih.....	46
4.1.2	Visi, Misi, dan Tujuan UPTD PSAA Budi Asih.....	47
4.1.3	Tugas dan Fungsi UPTD PSAA Budi Asih.....	47
4.1.4	Nama dan Struktur Jabatan Pegawai UPTD PSAA Budi Asih	48
4.2	Gambaran Umum Program Penanganan Anak Terlantar.....	50
4.2.1	Landasan Hukum Program Penanganan Anak Terlantar .	50
4.2.2	Program Penanganan Anak Terlantar.....	52
4.2.2.1	Sub Program Perlindungan	54
4.2.2.2	Sub Program Pengasuhan	57
4.2.2.3	Sub Program Pelayanan Sosial	60
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1	Komunikasi	65
5.1.1	Komunikasi dalam Sub Program Perlindungan.....	66
5.1.2	Komunikasi dalam Sub Program Pengasuhan	74
5.1.3	Komunikasi dalam Sub Program Pelayanan Sosial	83
5.2	Sumber Daya	93
5.2.1	Sumber Daya dalam Sub Program Perlindungan	93
5.2.2	Sumber Daya dalam Sub Program Pengasuhan.....	102
5.2.3	Sumber Daya dalam Sub Program Pelayanan Sosial	111
5.3	Disposisi	124
5.3.1	Disposisi dalam Sub Program Perlindungan	125
5.3.2	Disposisi dalam Sub Program Pengasuhan.....	129
5.3.3	Disposisi dalam Sub Program Pelayanan Sosial	134
5.4	Struktur Birokrasi	139
5.4.1	Struktur Birokrasi dalam Sub Program Perlindungan	140
5.4.2	Struktur Birokrasi dalam Sub Program Pengasuhan	145
5.4.3	Struktur Birokrasi dalam Sub Program Pelayanan Sosial	149
VI.	PENUTUP.....	156
6.1	Simpulan.....	156
6.2	Saran.....	156
	DAFTAR PUSTAKA	158

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian.....	38
2. Nama dan Struktur Jabatan	48
3. Keuangan Individu Anak	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	30
2. Pendataan Anak.....	54
3. Salah Satu Hasil Pendataan Anak	55
4. Pelaksanaan Assesment Minat Bakat.....	55
5. Daftar Penempatan Sekolah Anak	56
6. Proses Bimbingan Belajar Primagama.....	57
7. Asrama Putra/Putri UPTD PSAA Budi Asih.....	58
8. Ruang Makan Anak UPTD PSAA Budi Asih.....	58
9. Ruang Belajar Anak UPTD PSAA Budi Asih	59
10. Tempat Menjemur Pakaian	59
11. Surat Penggunaan Rumah Dinas untuk Pengasuh di Asrama UPTD PSAA Budi Asih	60
12. Cek Kesehatan Anak1	61
13. Bimbingan Olahraga Senam.....	62
14. Bimbingan Keagamaan	62
15. Bimbingan Sosial melalui Bimbingan Konseling	63
16. Keterampilan Kerja Menjahit.....	64
17. Keterampilan Kerja Hidroponik.....	64
18. Keterampilan Kerja Otomotif.....	64
19. Diskusi serta Tanya Jawab antar Implementor.....	67
20. Sosialisasi Intensif melalui Apel Pagi	69
21. Sosialisasi Intensif melalui Diskusi Umum	70
22. Sosialisasi Intensif melalui Perekrutan Calon Anak	70
23. Pemberian Masukan Kepada Anak Secara Individual	72

24. Diskusi serta Tanya Jawab antar Implementor.....	75
25. Sosialisasi Intensif melalui Apel Pagi	78
26. Sosialisasi Intensif melalui Diskusi Umum	78
27. Sosialisasi Intensif melalui Perekrutan Calon Anak	78
28. Pemberian Masukan Kepada Anak Secara Individual	81
29. Diskusi serta Tanya Jawab antar Implementor.....	84
30. Sosialisasi Intensif melalui Apel Pagi	86
31. Sosialisasi Intensif melalui Diskusi Umum	86
32. Sosialisasi Intensif melalui Perekrutan Calon Anak	87
33. Pemberian Masukan Kepada Anak Secara Individual	89
34. Standar Operasional Prosedur UPTD PSAA Budi Asih	95
35. Bagan Struktur Birokrasi Implementor Program	95
36. Proses Bimbingan Belajar Primagama	96
37. Daftar Penempatan Sekolah Anak.....	96
38. Daftar Kehadiran Keamanan Malam.....	97
39. Bangunan UPTD PSAA Budi Asih.....	97
40. Komputer dan Printer UPTD PSAA Budi Asih.....	101
41. Standar Operasional Prosedur UPTD PSAA Budi Asih	104
42. Bagan Struktur Birokrasi Implementor Program	104
43. Asrama Putra/Putri UPTD PSAA Budi Asih	105
44. Ruang Makan Anak UPTD PSAA Budi Asih.....	105
45. Tempat Menjemur Pakaian	106
46. Surat Penggunaan Rumah Dinas untuk Pengasuh di Asrama UPTD PSAA Budi Asih	107
47. Kerusakan Jendela.....	109
48. Alat Pendukung Keterampilan Kerja Menjahit	112
49. Musholla UPTD PSAA Budi Asih.....	113
50. Aula Serbaguna UPTD PSAA Budi Asih	114
51. Standar Operasional Prosedur UPTD PSAA Budi Asih	114
52. Bagan Struktur Birokrasi Implementor Program	115
53. Pelayanan Kesehatan Anak oleh Tenaga Kesehatan.....	116
54. Bimbingan Keagamaan oleh Tenaga Ahlinya.....	117

55. Keterampilan Kerja Hidroponik oleh Tenaga Ahlinya	117
56. Keterampilan Kerja Otomotif oleh Tenaga Ahlinya	117
57. Pemberian Teguran oleh Aparat UPTD PSAA Budi Asih.....	128
58. Pengecekan Rutin Asrama Putra/Putri	131
59. Pemberian Teguran oleh Aparat UPTD PSAA Budi Asih.....	132
60. Pengarahan Aparat dalam Keterampilan Kerja Menjahit.....	135
61. Pemberian Teguran oleh Aparat UPTD PSAA Budi Asih.....	137
62. Standar Operasional Prosedur UPTD PSAA Budi Asih	142
63. Pelaksanaan Assesment Minat Bakat	144
64. Standar Operasional Prosedur UPTD PSAA Budi Asih	146
65. Surat Penggunaan Rumah Dinas untuk Pengasuh di Asrama UPTD PSAA Budi Asih	148
66. Standar Operasional Prosedur UPTD PSAA Budi Asih	151
67. Pengarahan Aparat dalam Keterampilan Kerja Menjahit.....	153

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial yang ada di negara Indonesia haruslah segera dikurangi mengingat sudah banyaknya permasalahan yang ada. Salah satunya adalah permasalahan anak terlantar yang masih banyak terjadi. Anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial (UPTD PSAA Budi Asih, 2021 : 6). Wajib bagi seorang anak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak-haknya agar mendapatkan penghidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwasannya anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pada daerah-daerah yang terdapat di negara Indonesia masih banyak terjadi kasus penelantaran anak baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Contohnya saja pada daerah Provinsi Lampung yang masih kerap terjadi permasalahan sosial ini.

Menurut Dinas Sosial Provinsi Lampung (2022) bahwa sebanyak 8.534 anak yang mendapati permasalahan penelantaran oleh keluarganya baik secara sengaja ataupun tidak disengaja serta sebanyak 490 anak yang terserap ke

dalam lembaga pemerintah. Terdapat berbagai macam faktor penyebab anak mengalami penelantaran seperti permasalahan ekonomi yang mana sebagian besar dari mereka memiliki keluarga yang tidak mampu dan tidak dapat memberdayakan dirinya serta minimnya kepedulian masyarakat (Chairun Nasirin, 2013 : 241). Sedangkan Syarifah Lubna Asseggaf (2014 : 29-30) yang membagikan ketelantaran anak kedalam dua garis besar yakni faktor ketidaksengajaan atau pada suatu kondisi tertentu yang menyebabkan ketidakmungkinan orang tua dan/atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya serta faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab orang tua dan keluarga kepada anaknya. Dengan kata lain, masalah anak terlantar bukan sekedar ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya maupun memiliki orang tua yang kekurangan ekonomi, namun, terlantar disini memiliki makna bahwa ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, memperoleh pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang memadai tidak terdapat pada diri anak maka anak tersebut merupakan anak yang terlantar. Mengingat anak merupakan investasi masa depan sebuah negara yang apabila tak kunjung diselesaikan akan mendapatkan permasalahan yang lebih serius.

Anak yang terlantar akan mendapatkan dampak yang buruk. Salah satu dampaknya yakni fisik meliputi kesehatan tumbuh dan kembang anak yang terganggu, psikologis yang terganggu akibat perlakuan yang salah sehingga menyebabkan trauma atau keberanian dalam menyampaikan sesuatu yang mereka inginkan/rasakan tidak disampaikan, dan sulitnya mengekspresikan kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik (Zulfa H. Ulya, 2018 : 34-35). Beragam permasalahan yang menyebabkan anak ditelantarkan serta dampak yang memprihatinkan bagi anak inilah yang menjadi urgensi permasalahan sosial ini. Butuhnya intervensi dari pemerintah terkait penanganan ataupun penekanan agar tindakan penelantaran anak dapat dikurangi dan dilakukannya rehabilitasi sesegera mungkin dapat terlaksana.

Pada permasalahan anak terlantar ini, pemerintah Indonesia sudah lama membentuk instansi yang bergerak dalam penanganan anak terlantar. Sebagai salah satu contohnya adalah hadirnya instansi Dinas Sosial Provinsi Lampung yang menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Lampung. Pembagian terkait penanganan berbagai macam permasalahan sosial yang ada sudah tercantum dengan pasti dalam kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Lampung kepada uptd-uptd yang ada. Pemberian tugas oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk menangani permasalahan anak terlantar di Lampung ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Budi Asih. Menurut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2020 pasal 148 bahwasannya UPTD PSAA Budi Asih mempunyai tugas seperti memberikan penyantunan dan pelayanan, meliputi bimbingan fisik, bimbingan sosial, latihan keterampilan, dan pembinaan lanjutan bagi anak-anak yatim piatu. Dipertegas dalam buku profil UPTD PSAA Budi Asih (2021 : 6) bahwasannya lembaga panti sosial asuhan anak merupakan lembaga sosial profesional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu terlantar. Anak yatim, piatu, yatim piatu yang/dan terlantar yang dimaksud adalah anak dengan usia dibawah 18 tahun serta belum menikah dan belum bekerja. Berkisar usia dibawah 18 tahun inilah yang menjadikan anak terlantar di Lampung membutuhkan perlindungan oleh panti sosial asuhan anak yakni UPTD PSAA Budi Asih.

Pada dasarnya, UPTD PSAA Budi Asih adalah tempat atau wadah naungan bagi anak-anak yang terlantar. Untuk menjalankan peraturan dasar dari pemerintah terkait Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2020, UPTD PSAA Budi Asih menjalankan serta menerapkan program penanganan anak terlantar. Program ini dijalankan untuk menekan angka dari permasalahan anak terlantar dan memberikan pengasuhan kepada anak-anak yang terlantar. Program penanganan anak terlantar memiliki tujuan untuk menjadikan anak-anak yang terlantar baik. Baik dari sisi etika, akhlak, prilaku dan lain sebagainya. Disisi lain, pada pelaksanaan program penanganan anak

terlantar ini terdapat beberapa kekurangan. Pertama, sumber daya manusia yang ada pada UPTD PSAA Budi Asih terdapatnya kekurangan sumber daya manusia yang ada sehingga menyebabkan beberapa implementor yang merangkap pekerjaan/*multi job* disertai implementor yang menangani pelayanan kepada anak hanya 6 orang (3 orang pekerja sosial, 1 tenaga sukarela, dan 2 orang pengasuh) sehingga dalam memberikan pelayanan kepada 50 anak. Kedua, sumber daya peralatan/sarana dan prasarana kurang seperti untuk penunjang pembelajaran era globalisasi yang ada pun masih kurang memadai yakni ketersediaan komputer/laptop yang tidak ada, meja, jendela yang sudah lapuk, kurang memadainya tempat penjemuran baik pada asrama putra/putri, dan lain sebagainya. Ketiga, kurangnya sumber daya anggaran yang ada pada UPTD PSAA Budi Asih sehingga pembatasan pada pengeluaran keperluan dalam melayani anak-anak panti seperti makanan, transportasi sekolah dan lain sebagainya menjadi terbatas agar tercukupinya segala aspek dengan uang yang seadanya. Meninjau dari kekurangan-kekurangan yang ada pada program penanganan anak terlantar oleh UPTD PSAA Budi Asih, peneliti ingin memfokuskan pada pengimplementasian program penanganan anak terlantar ini, apakah berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini saya ingin meneliti terkait “Implementasi Program Penanganan Anak Terlantar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung”.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Implementasi Program Penanganan Anak Terlantar yang akan penulis jadikan sebagai referensi dalam penyempurnaan karya tulis ini, yaitu :

Penelitian pertama karya Gumilang Rianto Prakoso, Mukarto Siswoyo, dan Moh. Sutarjo dengan terbitan tahun 2013 yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Cirebon (Studi Kasus di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon). Pada penelitian ini, kesimpulan yang bisa peneliti sampaikan dari penelitian terdahulu ini

adalah pada pengimplementasian program pembinaan anak jalanan di Kota Cirebon apabila melihat menggunakan 4 indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn belum berhasil secara optimal. Perlunya peningkatan dalam segi komunikasi yang baik antar organisasi, peningkatan dari segi sosial yakni tidak memfokuskan kepada anak jalanan saja tetapi memberikan sosialisasi terhadap keluarganya, ekonomi yakni peningkatan anggaran, politik, karakteristik agen yang harus ikut turun tangan dalam pembinaan anak jalanan dan tidak hanya melapor saja dan lain sebagainya. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya adalah terdapat pada penggunaan teori indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Pada penelitian ini menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn sedangkan pada penelitian saya menggunakan teori menurut Edward III. Fokus penelitian dalam penelitian ini terkait dengan program pembinaan anak jalanan sedangkan pada penelitian saya berfokus pada program penanganan anak terlantar yang jelas pada hal ini cukup berbeda konsen penelitian antara objek penelitian dengan programnya.

Penelitian kedua karya Ani Zuliayani, Maman Rahman, dan Tijan dengan terbitan tahun 2015 yang berjudul Implementasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Anak “Gratama” Semarang. Pada penelitian terdahulu yang kedua ini kesimpulan yang bisa peneliti sampaikan adalah program bantuan pendidikan ini merupakan program yang dijalankan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Gratama dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Semarang selain program bantuan keterampilan dan bantuan orang tua ANJAL. Pada pengimplementasiannya program ini sudah cukup berhasil apabila dilihat dari indikator keberhasilan program menurut RPSA Gratama yang berhasil mencapai tujuannya yakni anak tidak lagi beraktifitas di jalan, anak kembali ke bangku sekolah bagi yang usia sekolah, anak mampu memiliki penghasilan yang layak atas keterampilan yang dimiliki, dan anak mampu menahan diri dari godaan-godaan untuk kembali ke jalanan. Pada program ini telah berhasil memberi pendidikan kepada anak akan tetapi memiliki hambatan seperti komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasinya. Namun program ini telah didukung oleh faktor disposisi (sikap pelaksana) yang baik dari para implementor yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini memfokuskan objek penelitian terhadap anak jalanan sedangkan objek penelitian saya terhadap anak terlantar. Anak jalanan dengan anak terlantar sudah cukup jelas berbeda dengan hal ini. Perbedaan lain terdapat pada programnya.

Penelitian ketiga karya Rizki Rahadian Ramadhan dengan terbitan tahun 2014 yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2002 tentang Anak Jalanan di Kota Samarinda. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah untuk implementasi peraturan pemerintah nomo 16 tahun 2002 tentang anak jalanan di Kota Samarinda masih terdapat kekurangan seperti tempat penampungan khusus anak jalanan masih belum disediakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, belum dilaksanakan/diadakannya pelatihan keterampilan untuk mengembangkan potensi anak jalanan, dan lain sebagainya. Namun, dalam penelitian ini terdapat beberapa poin plus/penting untuk anak jalanan seperti terdapatnya bimbingan mental sosial yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial anak dan pengembangan kepribadiannya, selain itu juga terdapat bimbingan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketekunan beribadah, dan akhlak pada anak agar menjadi pribadi yang baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terdapat pada objek fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini berfokus pada anak jalanan sedangkan dalam penelitian saya yakni anak terlantar. Hal lain juga terdapat pada perbedaan program antara penelitian ini dengan penelitian saya.

Penelitian keempat karya Asrul Nurdin dengan terbitan tahun 2013 yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Pada penelitian terdahulu ini peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya pada pengimplementasiannya pemerintah Kota Makassar telah

berupaya melakukan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada perda no 2 tahun 2008 tersebut. Untuk menunjang keberhasilan dari pengimplementasiannya pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar melakukan kerjasama dengan lembaga sosial lainnya seperti panti asuhan, kepolisian, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini juga terdapat faktor penghambat dalam pengimplementasiannya yakni industrialisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini menggunakan kebijakan ataupun program pada peraturan daerah. Sedangkan dalam penelitian saya menggunakan program dari UPTD langsung. Fokus penelitian pada penelitian ini lebih membahas yang ada di Kota Makassar yakni anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Sedangkan dalam penelitian saya lingkup Provinsi Lampung namun berfokus dalam uptd saja.

Penelitian kelima karya Lina Fitri Andriati dengan terbitan tahun 2011 yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Rangka Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan. Kesimpulan yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah pada pengimplementasian kebijakan ini menganut pada undang-undang yang berlaku. Pola perlindungan dan pembinaan yang dilakukan adalah melakukan perlindungan hukum dan pelatihan-pelatihan, serta bekerja sama dengan LSM/Rumah singgah. Pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sudah melakukan kerjasama dengan pihak luar. Hasil dari perlindungan dan pembinaan adalah pelatihan otomotif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya terdapat pada kebijakan ataupun program didalamnya. Hal lain juga terdapat perbedaan dalam fokus kebijakan mengenai objek atau sasaran dari program. Pada penelitian saya objek atau sasaran dari program yakni anak terlantar sedangkan dalam penelitian ini yaitu anak jalanan.

Penelitian terdahulu terakhir yakni karya Indra Gunawan dengan terbitan tahun 2014 yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Layanan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Kesimpulan yang didapat dari penelitian terdahulu ini adalah pada pelaksanaan program PMKS dilakukan atas dasar UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwasannya pada pengimplementasian programnya telah menggambarkan kondisi perencanaan dan memanejemenkan pada penerapan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar di Kota Bengkulu. Didalam implementasian programnya juga terdiri dari organisasi pelaksanaan, interpretasi program, dan penerapan program. Akan tetapi program layanan tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak diterimanya oleh anak jalanan dan anak terlantar sebagaimana yang telah menjadi sasaran utama dalam program ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terdapat pada programnya. Penelitian ini menggunakan program layananan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sedangkan pada penelitian saya menggunakan program penanganan anak terlantar. Hal lain juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitiannya.

Penelitian ini menarik untuk terus dikembangkan secara mendalam dan komprehensif. Kesimpulan pada uraian-uraian penelitian yang sebelumnya jelas sekali terdapat perbedaan dengan penelitian ini baik dilihat pada fokus penelitian, program yang dikaji, tempat penelitian, waktu penelitian, dan teori yang digunakan dalam penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang terdapat dalam latar belakang masalah penelitian maka penulis merumuskan masalah yakni “Bagaimana Implementasi Program Penanganan Anak Terlantar Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang didapat dalam penelitian ini berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah yaitu “Untuk mengetahui Implementasi Program Penanganan Anak Terlantar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini membahas salah satu kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam Implementasi Program Penanganan Anak Terlantar Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung bagi Penanganan Anak Terlantar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Robert Eyeston yang dikutip oleh Budi Winarno (2005) bahwasannya ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Serupa dengan Jones yang mendefinisikan bahwa kebijakan publik digunakan sebagai pemberian definisi kebijaksanaan negara. Sedangkan menurut Thomas R. Dye dalam AG. Subarsono (2013 : 2) yang memberikan definisi kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Solichin Abdul Wahab (2004) memberikan pemaparannya terkait definisi kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (*a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selections of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*). Sedangkan menurut Chief J.O Udoji

dalam Solichin Abdul Wahab (2004) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat (*an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*).

Amir Santosa (1993 : 4-5) mengkomparasikan kedalam dua wilayah kategori definisi kebijakan publik. Pertama, pendapat ahli yang mengartikan kebijakan publik sebagai segala suatu tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Namun, Amir Santosa membagi lagi kedalam dua bagian/kubu pada kategori yang kedua yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang dapat diramalkan. Para ahli yang termasuk kedalam kubu ini melihat bahwasannya kebijakan publik dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Definisi kebijakan publik lain menurut James E. Anderson (1979) yang mengartikan bahwasannya kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Aktor-aktor bukan pemerintah/swasta turut mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik adanya.

2.1.2 Jenis Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (1979) mengategorikan menjadi empat kelompok jenis-jenis kebijakan publik, diantaranya :

a. Kebijakan Substansif versus Kebijakan Prosedural

Kebijakan substansif memiliki makna bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural yakni upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan substantif dapat dijalankan.

b. Kebijakan Material versus Kebijakan Simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberi keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberkan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

c. Kebijakan yang Berhubungan Barang Umum (*Public Goods*) dan Barang Privat (*Privat Goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Kebijakan Distributif versus Kebijakan Regulator versus Kebijakan Re-distributif

Kebijakan distributif merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulator adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Sedangkan William N. Dunn (2009 : 72) mengemukakan jenis-jenis kebijakan publik menjadi tiga kelompok, yakni :

a. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik makro merupakan suatu kebijakan yang lahir dan menjadi suatu kebijakan yang mendasar atau suatu kebijakan yang bersifat makro atau umum. Contohnya dalam kebijakan publik mendasar : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

b. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik meso merupakan suatu kebijakan publik menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan, Contoh dalam kebijakan publik menengah : Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur dan bupati.

c. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik mikro merupakan suatu kebijakan yang bersifat mikro yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang berada di atasnya. Contohnya dalam kebijakan publik mikro : peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik tertentu yang berada dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota.

2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik

Pada tahapan yang dilaksanakan dalam kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003 : 24-25) bahwasannya terdapat lima bagian, diantaranya :

a. Penyusunan Agenda

Tahapan pertama dalam kebijakan publik adalah penyusunan agenda yang di dalamnya para perumus kebijakan menempatkan masalah pada agenda publik. Penempatan masalah dilakukan agar mendapatkan permasalahan yang perlu diprioritaskan untuk diselesaikan dalam bentuk kebijakan publik. Terdapat masalah yang tidak dapat disentuh sama sekali dan ada pula yang ditunda untuk waktu yang lama. Penyusunan agenda dapat disebut sebagai sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realistik kebijakan publik.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam tahapan agenda kebijakan, selanjutnya akan dibahas oleh para perumus kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Alternatif-alternatif kebijakan yang telah dirumuskan akan diadopsi atau ditentukan yang terbaik untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau peradilan.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahapan implementasi kebijakan akan ditemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Tahapan ini pula akan terlihat kebijakan yang berlaku sudah sesuai harapan dalam terpecahnya masalah yang ada ataupun tidak.

e. Penilaian Kebijakan

Tahapan penilaian kebijakan adalah tahapan yang ditemukannya kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapannya ataupun tidak. Individu/aparatur/unit-unit yang bertugas untuk memeriksa baik dalam pemerintahan ataupun tidak akan menilai dan menentukan suatu kebijakan yang telah diimplementasikan tercapai sesuai dengan harapan/pemecah masalah yang ada ataupun tidak.

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Widodo (2007 : 86) mengemukakan bahwasannya implementasi kebijakan publik merupakan *“policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decision into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”*. Artinya implementasi kebijakan mencakup implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan tersebut oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ini termasuk upaya satu kali untuk mengubah keputusan menjadi istilah operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Gerston (1992), implementasi adalah tugas administrasi yang mentransfer komitmen kebijakan kedalam praktik.

Kemudian, Ramdhani dan Ramdhani (2017) menjelaskan implementasi kebijakan publik merupakan implementasi atau penerapan suatu

kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Nugroho (2004 : 158) berpendapat mengenai implementasi kebijakan bahwasannya hakikat dari implementasi kebijakan adalah tindakan (*action*) agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurutnya, dalam pengimplementasian kebijakan publik terdapat dua langkah yakni mengimplementasikannya kedalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Mazmanian dalam (Agustino, 2008) mengungkapkan mengenai definisi implementasi kebijakan publik sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu kerangka kebijakan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, instruksi dan himbauan yang sifatnya imperatif atau keputusan badan peradilan lainnya. Sedangkan menurut Rose dalam (Nawawi, 2009) implementasi kebijakan publik merupakan berbagai macam kegiatan yang akan selalu berkaitan dengan segala konsekuensi-konsekuensinya yang dilakukan oleh sejumlah aktor yang berkepentingan sebagai suatu keputusan bersama.

2.2.2 Tahapan Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebastier (dalam M. Reza, 2016), ia mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yakni :

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang membahas mengenai mudah-tidaknya suatu masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksana, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2. Variabel Intervening

Yaitu variabel kemampuan suatu kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar ; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan resources dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Variabel Dependen

Dalam variabel ini dapat diartikan sebagai tahapan dalam proses implementasi kebijakan dengan terdapat lima tahapan, yaitu tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana pada disusunnya dari bentuk kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Sedangkan menurut Widodo (dalam Achmad Baidowi, 2020) terdapat tiga tahapan dalam proses implementasi kebijakan, yakni :

1. Tahap Interpretasi

Tahap Interpretasi merupakan kegiatan interpretasi substansi dari suatu kebijakan serta menggunakan bahasa yang lebih operasional dan mudah untuk dipahami.

2. Tahap Pengorganisasian

Pada tahapan ini merupakan suatu usaha untuk mengupayakan penetapan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-

metode yang mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

3. Tahap Aplikasi Kebijakan

Tahap aplikasi merupakan tahapan aktivitas penyedia layanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan sasaran kebijakan dan tujuannya.

Sejalan dengan ungkapan Tri Wulandari (2016) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdapat tiga tahapan, yakni :

1. Interpretasi

Proses interpretasi menurutnya adalah suatu tahapan dalam implementasi kebijakan yang melakukan penyusunan rencana kegiatan, memberikan informasi kepada institusi dan lembaga provinsi/kota terkait kejelasan kebijakan yang dijalankan agar mendapatkan sasaran kebijakan yang tepat.

2. Pengorganisasian

Tahapan pengorganisasian merupakan tahapan dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi seperti sumber daya manusia terkait penentuan panitia lingkup seksi ataupun panitia yang melibatkan pihak luar seperti Dinas Pendidikan, penentuan anggaran yang dialokasikan kepada bidang-bidang, pembuatan proposal dan lain sebagainya.

3. Aplikasi

Pada tahap implementasi kebijakan yakni aplikasi ini menurutnya pada tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan program yang dimaksud dapat berupa sosialisasi, advokasi, pembentukan kader dan lainnya. Kegiatan-kegiatan

tersebut dilakukan agar kebijakan yang telah dibentuk dapat mencapai tujuan dalam pengimplementasiannya.

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Berikut adalah rincian mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam beberapa kutipan ahli, diantaranya sebagai berikut :

1) Menurut Suharno

Pada model implementasi George C. Edward III yang dikutip dalam (Suharno, 2013 : 170-171) terdapat empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni :

a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan kegiatan oleh implementor kebijakan untuk memberikan pengertian/informasi kepada sasaran kebijakan mengenai poin-poin penting dari kebijakan seperti tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh sasaran kebijakan yang diberikan melalui proses sosialisasi kebijakan yang intensif dengan menggunakan media elektronik atau menggunakan cara tatap muka langsung dengan mengumpulkan sasaran kebijakan secara umum maupun secara individual agar sasaran kebijakan mengerti kegiatan yang akan dilaksanakannya dan bersedia mengikuti pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan sebagaimana mestinya. Sosialisasi yang diberikan merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan dari komunikasi dan juga sebagai penentu dari pengimplementasian kebijakan apakah akan terimplementasi dengan baik atau terimplementasi dengan kurang baik. Selain menginformasikan sasaran kebijakan, pelaksana kebijakan haruslah mengetahui

secara mendalam mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan agar terjadinya pengimplementasian kebijakan sesuai dengan kemauan ataupun hasil secara murni oleh pembuat kebijakan tersebut. Pada dasarnya, keberhasilan implementasi dengan baik ataupun kurang baik dapat dilihat dari penguasaan pengetahuan pelaksana kebijakan mengenai apakah memahami atau tidak dari kebijakan yang ada sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan. Tentunya hal ini juga menghindari kesalahpahaman antar pelaksana kebijakan lainnya terkait dalam pelaksanaan kebijakan yang hendak dilakukan.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya juga memiliki peran yang penting dalam implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dalam hal ini dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya peralatan. Sumber daya yang dilibatkan tentunya dapat dicari dari pihak lain seperti pihak pemerintah maupun pihak swasta jika memungkinkan untuk diperlukan. Sumber daya menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila tidak terdapatnya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakannya, maka kebijakan itu hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.

c. Disposisi

Disposisi yang dimaksud oleh Edward III merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti ;

komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain sebagainya. Disposisi menjadi variabel yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Suatu kebijakan yang bagus kadangkala harus terpaksa mengalami kegagalan di tengah jalan ataupun salah sasaran dikarenakan perilaku dari para implementor kebijakan yang buruk. Implementor kebijakan diharuskan memiliki manajemen emosi yang baik sesuai dengan fakta yang akan terjadi di lapangan. Terkait apakah terdapat masalah maupun tidak terdapat masalah, implementor harus dapat memanajemen emosi dengan baik agar disposisi yang dimilikinya dapat terkontrol dan baik adanya. Dengan kata lain, pada tahap ini watak dan karakteristik yang baik berupa komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain sebagainya serta manajemen emosi yang baik terkait fakta yang terjadi di lapangan sangatlah diperlukan oleh implementor kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.

2) Menurut Leo

Pada model implementasi George C. Edward III yang dikutip dalam (Leo, 2006 : 79) terdapat empat variabel bebas yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik diantaranya :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di tranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3) Menurut Siti Widharetno M.

Model implementasi kebijakan yang bersifat *top-down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang dikutip dalam (Siti, 2017 : 130-131) terdapat empat variable yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi terkait pengimplementasian suatu kebijakan publik, Edward III mengemukakan 3 indikator keberhasilan variabel komunikasi

tersebut, diantaranya sebagai berikut ; i) Transmisi, adalah penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, ii) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu, dan ; iii) Konsistensi, terkait perintah yang diberikan dalam pelaksana suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau di jalankan.

b. Sumber Daya

Menurut Edward III indikator keberhasilan implementasi kebijakan dalam variabel sumber daya berfokus pada staf/aparat setempat/pelaksana kebijakan, informasi, otoritas, fasilitas meliputi bangunan, perlengkapan, tanah dan peralatan. Tentunya sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang di dalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

c. Disposisi

Menurut Edward III disposisi merupakan kecenderungan atau sikap yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam keberhasilan implementasi kebijakan pada struktur birokrasi indikatornya yakni terdapat standar

operasional prosedur (SOP) dalam suatu instansi pelaksana kebijakan tersebut. Standar operasional prosedur merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakantindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berbagai macam penjelasan/kutipan oleh para ahli mengenai indikator/variabel keberhasilan proses implementasi kebijakan menurut Edward III yang mengungkapkan empat variabel keberhasilan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memberikan peneliti pemahaman yang beragam dan dapat memberikan peneliti kesimpulan mengenai hal ini, bahwa, teori Edward III mengenai keberhasilan implementasi kebijakan yang dikutip oleh Suharno (2013) merupakan penjelasan yang lebih rinci dan lengkap dibandingkan dengan kutipan Leo (2006) dan Siti (2017).

Dalam kutipan Leo (2006) sudah selaras dengan apa yang telah dikutip oleh Suharno (2013) terkait empat variabel keberhasilan implementasi kebijakan di dalamnya. Namun, pada variabel komunikasi terdapat ketidakjelasan bentuk dari tranmisi kelompok sasaran agar terhindarnya dari resistensi dari kelompok sasaran, akan tetapi, untuk variabel lain selaras dengan kutipan Suharno (2013) yang memberikan ungkapan Edward III dalam kutipannya berdasar pada sumber aslinya. Sedangkan pada kutipan Siti (2017) masih terdapat beberapa pertanyaan mengenai ungkapan Edward III dalam kutipannya mengenai indikator

keberhasilan implementasi kebijakan pada variabelnya, seperti dalam variabel komunikasi apa bentuk penyaluran komunikasi yang baik yang dimaksud oleh Edward III dan pada variabel ini tidak terdapatnya penekanan kepada kelompok sasaran agar terhindarnya dari penolakan kebijakan adanya, pada variabel sumber daya juga masih terdapat ketidakjelasan dari bentuk sumber daya informasi seperti apa, dan lain sebagainya. Namun, pada kutipan Siti (2017) ini secara menyeluruh telah memberikan penguatan kutipan dari Suharno (2013) terkait keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III yang meyakinkan peneliti bahwa kutipannya berdasar pada sumber aslinya. Maka dari itu, peneliti menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III pada kutipan Suharno (2013 : 170-171) pada pengimplementasian program penanganan anak terlantar UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi di dalamnya.

2.3 Tinjauan Tentang Program Penanganan Anak Terlantar

2.3.1 Definisi Program Penanganan Anak Terlantar

Program Penanganan Anak Terlantar pada UPTD PSAA Budi Asih merupakan suatu program yang bergerak untuk melindungi anak-anak yang ditelantarkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tidak memiliki orang tua ibu/bapak ataupun keduanya, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya yang berusia dibawah 18 tahun belum menikah dan belum bekerja. Anak-anak yang dikelola di dalam UPTD PSAA Budi Asih merupakan anak yang tidak terurus oleh keluarganya sendiri. Dengan kata lain anak-anak yang dikelola merupakan anak terlantar dimana anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial (UPTD PSAA Budi Asih, 2021 : 6).

2.3.2 Tujuan Program Penanganan Anak Terlantar

Menurut profil UPTD PSAA Budi Asih (2021 : 9), tujuan program penanganan anak terlantar dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a) Menjamin terpenuhinya hak anak akan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi dan pengisian waktu luang.
- b) Terwujudnya mekanisme pengasuhan alternatif bagi anak yang karena satu dan lain hal tidak bisa mendapatkan pengasuhan dan perawatan dari keluarganya sendiri.
- c) Tersedianya pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan anak dan/ atau keluarganya yang dapat menunjang serta mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

2.3.3 Jenis-jenis Program Penanganan Anak Terlantar

Teknis operasional UPTD PSAA Budi Asih (2021 : 9-11) dalam menjalankan program penanganan anak terlantar dikelompokkan menjadi tiga jenis program, yaitu :

1) Perlindungan

Pelaksanaan kegiatan oleh UPTD PSAA Budi Asih dalam jenis program perlindungan diantaranya ; a) melakukan registrasi, assesment sampai terminasi menurut umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan, b) penempatan anak dalam segala penanganan baik dalam assesment, penempatan program baik di dalam maupun di luar panti, c) menjamin anak terlindungi dari pengaruh negatif baik yang ada dalam panti maupun dari luar panti, d) menjamin anak terlindungi dari tindak kekerasan baik yang ada di dalam panti maupun dari luar panti, e) menjamin anak bebas dari kegiatan eksploitasi maupun penyalahgunaan anak untuk tujuan tertentu, f)

menjamin partisipasi penuh anak dalam berbagai program termasuk pendidikan, dan g) menjamin Akses bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dasar.

2) Pengasuhan

Sistem pengasuhan yang dilaksanakan di UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung menggunakan sistem asrama. Dengan 2 (dua) unit asrama (putera dan puteri) seluas 260m² untuk asrama putera dan 195m² untuk asrama puteri, dapat menampung sebanyak 86 orang anak. Disisi lain, pengasuh yang tersedia dan tinggal di kompleks asrama, hanya 3 (tiga) orang. Walaupun model ini sangat klasikal dan terkesan dipaksakan, namun proses pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

3) Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial yang diberikan meliputi :

a) Penyantunan dan pengasramaan yang meliputi penyediaan permakanan, pemenuhan pakaian seragam sekolah, pelayanan kesehatan, pemberian bahan perawatan dan kebersihan.

b) Bimbingan Sosial, terdiri dari ;

- i. Bimbingan fisik meliputi bimbingan kedisiplinan, bimbingan olahraga dan kesehatan.
- ii. Bimbingan mental keagamaan meliputi tilawatil qur'an, belajar fiqih, tauhid, dan hadist, hafiz qur'an, belajar ceramah, dzikir bersama, bimbingan konsultasi keagamaan, serta solat berjama'ah.
- iii. Bimbingan sosial, individu, dan kelompok.
- iv. Keterampilan kerja meliputi seni hadroh, ketrampilan hidroponik, dan lain sebagainya.

2.4 Kerangka Pikir

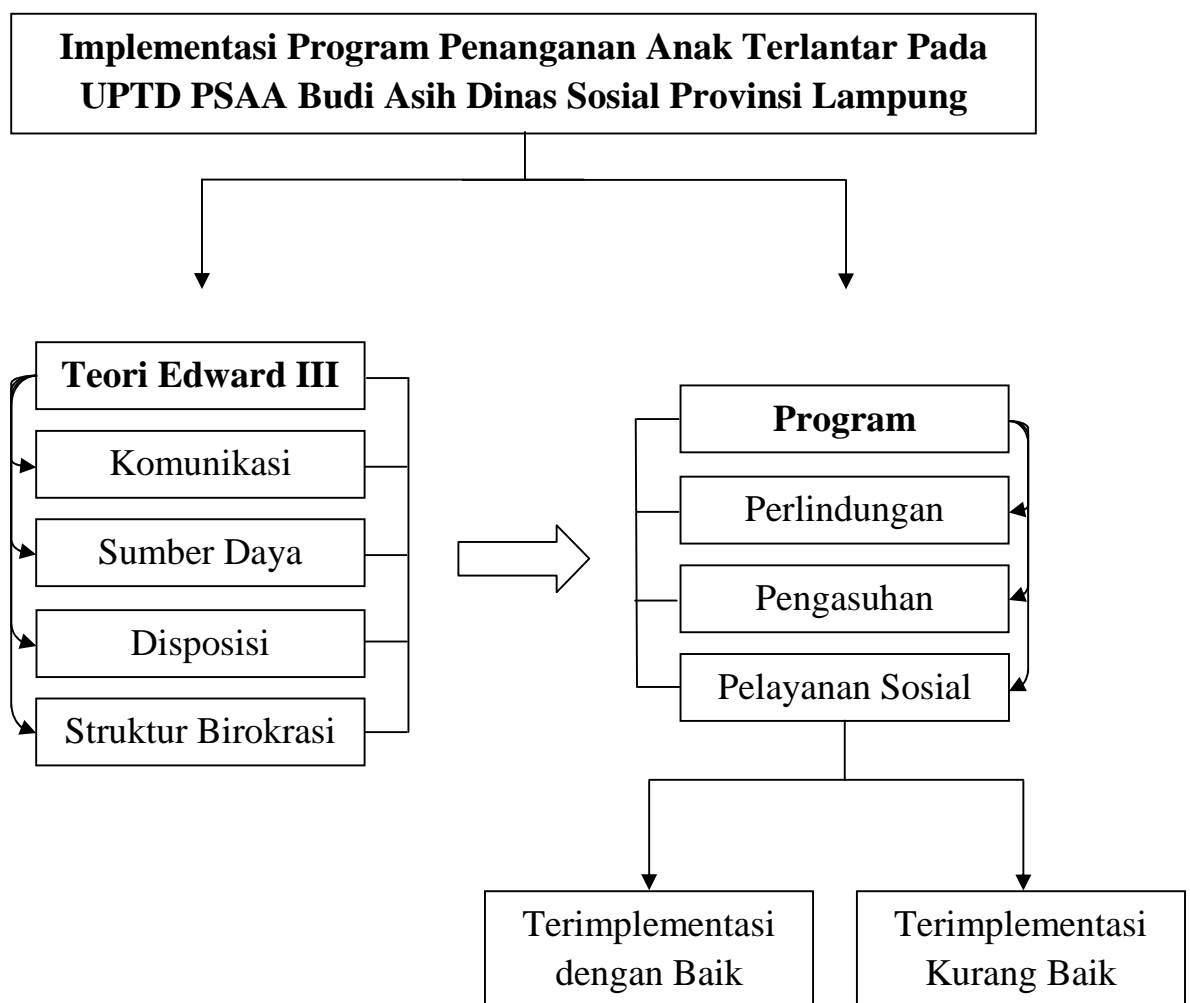
Menurut Rokhmat Subagiyo (2017) yang menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar teori yang telah diidentifikasi sebagai masalah faktor penting dan pemetaan pemikiran yang didasari atas konsep atau teori yang divisualisasikan dalam bentuk kerangka konseptual.

Dalam kerangka pikir terdiri dari teori, konsep-konsep, dan dalil yang merupakan dasar dari segalanya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dasar teori implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan peneliti gunakan sebagai dasar karena pada penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan/program yang ada pada UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung berupa program penanganan anak terlantar apakah implementasi yang dilakukan terimplementasi dengan baik ataupun kurang baik. Pasalnya dalam pelaksanaan kegiatan ataupun pengimplementasian kebijakan sudah pastilah berjalan/terimplementasi sebagaimana yang sudah diterapkan, namun, peneliti ingin melihat pengimplementasian dari Program Penanganan Anak Terlantar apakah terimplementasi dengan baik tanpa adanya hambatan yang fatal atau terimplementasi dengan kurang baik dikarenakan terdapatnya hambatan yang fatal dalam pelaksanaannya. Tentunya kebijakan tersebut berguna sebagai penanganan, pelayanan, rehabilitasi, dan pengembalian hak manusia pada umumnya terhadap anak-anak terlantar yang ada di Lampung. Dalam melihat pengimplementasian yang dilakukan oleh UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung terkait program penanganan anak terlantar meliputi :

- a. Program perlindungan pada anak seperti perlindungan hak asasi anak ;
- b. Program pengasuhan pada anak seperti pemberian asuhan dengan sistem asrama (putra dan putri) dengan pengasuh asrama sebanyak 3 orang ; dan
- c. Program pelayanan sosial yang meliputi penyantunan dan pengasramaan seperti penyediaan makanan, pakaian, kesehatan, pemberian bahan

perawatan dan kebersihan serta bimbingan sosial meliputi bimbingan fisik, bimbingan mental keagamaan, bimbingan sosial individu dan kelompok dan keterampilan.

Peneliti menggunakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang mencakup yakni ; 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi. Berikut adalah gambaran/bagan kerangka pikir yang dapat peneliti simpulkan mengenai penelitian ini, yaitu :



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber Gambar 1. : Diolah oleh peneliti Tahun 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini berjudul Implementasi Program Penanganan Anak Terlantar Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Dinas Sosial Provinsi Lampung, menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Stauss dan Corbin dalam (Farida Nugrahani, 2014 : 4) merupakan suatu penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti untuk melihat dan memahami atau meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

Penggunaan tipe penelitian deskriptif kualitatif sangat tepat dikarenakan dalam tipe penelitian ini akan meneliti bagaimana pelaksanaan atau Implementasi Program Penanganan Anak Terlantar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung dari segala aspek serta meninjau apakah pengimplementasiannya berjalan tanpa hadirnya faktor hambatan dan berhasil atau terdapat faktor penghambat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan bertujuan untuk pembatasan masalah atau pemilahan masalah agar penelitian dapat dilaksanakan dengan efektif (Farida Nugrahani, 2014 : 202). Pada penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan pada proses penanganan anak terlantar pada UPTD PSAA Budi Asih terkhusus

pada proses perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial yang diberikan oleh implementor program UPTD PSAA Budi Asih. Berikut adalah rincian fokus penelitian terkait Implementasi Program Penanganan Anak Terlantar pada UPTD PSAA Budi Asih dengan memperhatikan indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Komunikasi

Variabel komunikasi berfokus pada terdapatnya kejelasan informasi oleh anak-anak yang mengerti dan memahami terkait tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan di UPTD PSAA Budi Asih terkait program penanganan anak terlantar yakni pada sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial. Kejelasan informasi oleh sasaran kebijakan diperlukan agar terhindarnya penolakan untuk tidak mengikuti tahapan-tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh anak-anak. Maka dari hal itu, sosialisasi kebijakan secara intensif diperlukan agar anak-anak terdapat kejelasan informasi mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pada program penanganan anak terlantar terkhusus pada sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik. Agar tujuan pelaksanaan sosialisasi program penanganan anak terlantar dapat maksimal diketahui secara jelas oleh sasaran kebijakan, pelaksana kebijakan haruslah mengetahui informasi dari kebijakan secara jelas sesuai dengan capaian akhir pembuat kebijakan kebijakan/program penanganan anak terlantar khususnya pada sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial.

b) Sumber Daya

Variabel sumber daya berfokus sebagai penunjang keberhasilan implementasi program penanganan anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asih. Pelibatan sumber daya merupakan suatu hal yang penting akankah pengimplementasian dari program penanganan anak terlantar tertunjang

dengan baik maupun tidak. Pelibatan sumber daya akan memberikan dampak yang optimal bagi pengimplementasian suatu kebijakan yang ada, dengan atau tanpa pihak lain seperti pihak swasta maupun pemerintah lain. Pelibatan sumber daya dari pihak lain disini merupakan suatu hal yang dapat memungkinkan terjadi apabila instansi pelaksana kebijakan memerlukannya. Selain hal itu, sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya peralatan yang menunjang pelaksanaan program penanganan anak terlantar yakni perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial yang ada pada UPTD PSAA Budi Asih memadai atau tidak. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah implementor program apakah memadai dari segi jumlah ataupun tidak memadai dalam pelaksanaan program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial. Begitu pula pada aspek sumber daya finansial dan sumber daya peralatan apakah memadai atau tidak memadai dari segi jumlah maupun kelayakan dalam pelaksanaan program penanganan anak terlantar yakni pada perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial di UPTD PSAA Budi Asih. Namun, pada sumber daya manusia disamping cukup dari jumlah, implementor program juga harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan sebuah tugas, anjuran, serta perintah dari atasan (pimpinan).

c) Disposisi

Variabel disposisi berfokus pada watak dan karakteristik implementor program penanganan anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asih. Dalam hal ini, implementor program dapat dinilai dari komitmen, kejujuran, sifat demokratis pada pelaksanaan program penanganan anak terlantar terkhusus pada perjalanan sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial. Maksudnya, dalam hal ini watak dan karakteristik para implementor kebijakan dalam pelaksanaan sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial harus baik dalam melakukan penanganan. Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan, tentu implementor program harus dapat profesional dalam

menempatkan watak dan karakteristiknya. Manajemen emosi oleh para implementor kebijakan tentunya sangat diperlukan agar terhindarnya dari kegagalan pengimplementasian kebijakan/program penanganan anak terlantar di tengah jalan. Ketika dihadapi masalah maupun ketika tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial implementor perlu menekankan manajemen emosi di dalamnya.

d) Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi berfokus pada standar operasional prosedur sebagai penunjang keberhasilan implementasi program. Dalam hal ini, ada atau tidak adanya standar operasional prosedur pada program penanganan anak terlantar terkhusus pada sub-sub program yakni perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial di UPTD PSAA Budi Asih menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan pada variabel struktur birokrasi. Standar operasional prosedur dalam sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial menjadi kunci penting sebagai acuan pelaksanaan kegiatan para implementor program agar dapat tersusun dan tidak keluar isi, arah, dan tujuan akhir pembuat kebijakan adalah maksud dari hadirnya SOP. Selain SOP, dalam variabel ini berfokus pada rancangan struktur organisasi yang ada pada UPTD PSAA Budi Asih dalam menjalankan program penanganan anak terlantar apakah memiliki prosedur yang tidak terlalu panjang dan tidak berbelit-belit dalam pelayanan yang diberikan kepada anak serta mudah dalam pengawasan agar anak melaksanakan sub program yang sudah terancang atau berlainan. Apabila pelaksanaan sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial yang berbelit, prosedur terlalu panjang dan sulit untuk dilakukannya pengawasan maka akan berpengaruh pada tingkatan keberhasilan implementasi program penanganan anak terlantar.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat untuk para peneliti melakukan riset atau penelitian mengenai penelitiannya. Lokasi dalam penelitian ini terletak di UPTD PSAA Budi Asih. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan UPTD PSAA Budi Asih merupakan penyelenggara dan pelaksanaan Program Penanganan Anak Terlantar berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2020 tentang, buku profil UPTD PSAA Budi Asih, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Sosial Provinsi Lampung.

3.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data (Arini Permatasari, 2022 : 80) diantaranya sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dan mengobservasi terkait pelaksanaan program penanganan anak terlantar meliputi perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial.

a. Komunikasi, data yang ingin diteliti tentang :

- 1) Bentuk kegiatan antar implementor sebagai upaya pemahaman kebijakan/program penanganan anak terlantar secara mendalam yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan khususnya pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial.
- 2) Bentuk kegiatan sosialisasi intensif yang diselenggarakan oleh implementor kepada sasaran kebijakan sebagai upaya informasinya agar program penanganan anak terlantar khususnya

pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial terlaksana sesuai dengan kebijakan yang ada.

- 3) Faktor penghambat dari pelaksanaan bentuk kegiatan sosialisasi intensif dan kegiatan antar implementor sebagai upaya penginformasian kepada sasaran kebijakan oleh implementor serta pendalaman wawasan antar implementor khususnya pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial.

b. Sumber Daya, data yang ingin diteliti tentang :

- 1) Pelibatan sumber daya yang digunakan pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial.
- 2) Pelibatan sumber daya dari instansi pemerintah lain ataupun pihak swasta yang digunakan pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial.
- 3) Pemadaian dari sumber daya yang digunakan pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial.

c. Disposisi, data yang ingin diteliti tentang :

- 1) Watak dan karakteristik implementor kebijakan dalam menjalankan program khususnya pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial.
- 2) Manajemen emosi implementor kebijakan ketika terdapat masalah seperti penolakan dari sasaran kebijakan khususnya pada sub

program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial.

- d. Struktur Birokrasi, data yang ingin diteliti tentang :
- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan program khususnya pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial.
 - 2) Mekanisme pelaksanaan program seperti prosedur dan pengawasan pada program khususnya pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial.

Data ini digunakan untuk meringankan peneliti dalam mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada penelitian serta sebagai pengambilan keputusan.

2. Data Sekunder

Data yang sebagai pelengkap informasi dan penunjang fakta yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder berupa data-data yang tertulis seperti buku-buku, arsip-arsip pribadi, foto, berita, dan dokumen-dokumen resmi. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari dokumen jumlah anak beserta penempatan sekolahnya, dokumen penempatan implementor beserta tenaga sukarela untuk menetap di UPTD PSAA Budi Asih, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan tiap sub program, dokumen tenaga keamanan malam, dokumentasi hasil/pelaksanaan sosialisasi intensif, dokumentasi hasil/pelaksanaan diskusi disertai tanya jawab antar implementor, dokumentasi hasil/pelaksanaan keterampilan kerja, dokumentasi hasil/pelaksanaan bimbingan keagamaan, dan dokumentasi kegiatan anak yang dilaksanakan selama di UPTD PSAA Budi Asih.

3.5 Informan

Informan menurut Moleong dalam (Agung Prasetya, 2021 : 37) bahwasannya informan adalah seseorang yang mampu memberikan manfaat kepada peneliti berupa informasi pada suatu situasi & kondisi tentang latar penelitian. Informan haruslah bersifat sukarela untuk menjadi bagian dalam penelitian walaupun ia hanyalah bersifat sementara belaka. Peneliti harus mampu menilai informan yang baik dan relevan terkait penelitian yang ingin dikaji. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini terkait penentuan informan. *Purposive sampling* adalah upaya penentuan sampel sumber data dengan meninjau beberapa pertimbangan dan harapan atas sampel-sampel yang dipilih dapat memberikan informasi yang maksimal (Sugiyono, 2005 : 54).

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai pemenuhan informan sebagai pemenuhan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan informan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Penanganan Anak Terlantar di UPTD PSAA Budi Asih antara lain seperti pembuat program, pelaksana program, dan sasaran program. Berikut adalah rincian mengenai informan yang hendak peneliti pakai dalam penelitian ini, diantaranya :

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Kepala UPTD PSAA Budi Asih	Pelaksana Program
2	Kepala Tata Usaha	Pelaksana Program
3	Kepala Seksi Penyantunan	Pelaksana Program
4	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Program
5	Perwakilan Kelompok Pekerja Sosial	Pelaksana Program
6	Perwakilan Asrama Putra	Sasaran Program
7	Perwakilan Asrama Putri	Sasaran Program

Sumber Tabel 1. : Diolah oleh peneliti, 2022

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan sebuah jantung atau inti dari penelitian. Dikatakan demikian karena teknik ini merupakan tahapan awal untuk mendapatkan data. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai penghimpunan data dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang ingin peneliti gunakan, yakni :

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian atas segala sesuatu yang terjadi dengan menggunakan indera manusia untuk memperoleh data. Menurut Sutrisno Hadi dalam (Mufti Hasan Alfani, 2018 : 8) observasi adalah upaya pengamatan dan pencacatan secara terstruktur terkait fenomena-fenomena dari objek penelitian. Observasi yang dilakukan dapat berupa merekam perilaku responden atau realitas yang terjadi pada objek penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi terhadap pelaksanaan program penanganan anak terlantar pada UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung terkhusus pada sub program yakni perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial dengan menggunakan teori indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III. Peneliti melakukan observasi secara bertahap menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang digunakan pada sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial tentang ; 1) Pada program perlindungan peneliti telah mengobservasi aparatur di UPTD PSAA Budi Asih terkait tindakan yang dilakukan aparatur untuk melindungi anak apabila terdapat indikasi keterancaman anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat membuat anak terpengaruh oleh pengaruh negatif yang meliputi kekerasan, bebas dari

eksploitasi anak dan lain sebagainya, 2) Pada program pengasuhan peneliti telah mengobservasi sistem pengasuhan oleh implementor program kepada anak-anak yang ada dalam UPTD PSAA Budi Asih beserta sistem asrama yang digunakan, dan 3) Pada program pelayanan sosial peneliti telah mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan oleh implementor kebijakan seperti pemberian penyantunan ataupun pengasramaan meliputi pemenuhan pakaian seragam, makanan dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan bimbingan fisik, bimbingan mental keagamaan, bimbingan sosial, individu, dan kelompok, serta keterampilan pada anak seperti seni hadroh. Kegiatan observasi yang peneliti lakukan bermula pada 27 September 2022 – 24 Januari 2023 yang telah terlampir dengan rinci dan detail.

2. Wawancara

Kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam pemenuhan informasi berupa pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya dan dijawab oleh informan atau narasumber atau biasa disebut tanya jawab sehingga mencapai makna pembicaraan yang hendak dituju adalah pengertian wawancara. Menurut Sugiono dalam (Herlinda dkk, 2019 : 256) wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan diawali dengan studi pendahuluan sebagai penemuan permasalahan yang wajib diteliti serta memperoleh informasi secara mendalam dari responden adanya.

Peneliti telah mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada 7 informan yakni 5 implementor program, diantaranya; Drs. Eko Priono, MM selaku Kepala UPTD PSAA Budi Asih, Hodijah, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Lukman Hakim, SE selaku Kepala Seksi Penyantunan, Maryani, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelayanan, dan Siti Purwaningsih, S.Psi selaku Perwakilan Kelompok Jabatan Fungsional beserta 2 perwakilan sasaran program, diantaranya ; Rido Setiawan selaku Perwakilan Asrama Putra, dan Fitriani selaku Perwakilan Asrama Putri. Panduan wawancara yang

telah peneliti buat menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III sebagai dasar dalam pembuatan pertanyaan. Wawancara yang telah dilakukan berkaitan dengan program penanganan anak terlantar terkhusus pada sub program perlindungan, pengasuhan, dan pelayanan sosial yang telah dilaksanakan implementor program kepada sasaran program yakni anak-anak panti yang telah dilakukan pada 11 Januari – 27 Januari 2023 sebagaimana hasil wawancara yang telah terlampir dengan rinci dan detail.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sukmadinata dalam (Herlinda dkk, 2019 : 256) merupakan cara pengumpulan data berupa penghimpunan dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik pada proses pelaksanaan wawancara ataupun pada proses observasi dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

- 1) Pendataan anak beserta hasil pendataan.
- 2) Proses bimbingan belajar.
- 3) Proses bimbingan keagamaan.
- 4) Proses bimbingan olahraga senam.
- 5) Proses bimbingan konseling.
- 6) Proses keterampilan kerja anak.
- 7) Proses cek kesehatan anak.
- 8) Proses diskusi disertai tanya jawab antar implementor.
- 9) Proses sosialisasi intensif seperti apel pagi, diskusi umum, dan pada saat perekrutan calon anak.
- 10) Proses pemberian masukan/teguran kepada anak secara individual.
- 11) Sumber daya peralatan seperti bangunan, komputer, printer, asrama, dan lain sebagainya.
- 12) Proses pelaksanaan assesment minat bakat anak.
- 13) Dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang peneliti gunakan seperti dokumentasi pada dokumen standar operasional prosedur,

kehadiran tenaga keamanan malam, surat penempatan rumah dinas untuk pengasuh, daftar anak serta penempatan sekolahnya, dan bagan struktur birokrasi implementor program.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Tahapan selanjutnya dari data yang telah diperoleh dari lapangan adalah tahapan pengolahan data. Peneliti dalam tahapan ini menggunakan dua macam yakni :

1. Editing Data

Editing data adalah upaya seorang peneliti dalam pemrosesan suatu data agar dapat diklarifikasikan dari data yang diperoleh, hasil pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam pencatatan/pengumpulan data dilapangan serta bersifat mengoreksi (Indra Firdiyansyah, 2017).

Peneliti telah melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan teknik editing data yakni dengan cara mengklasifikasikan data yang telah diperoleh oleh peneliti di UPTD PSAA Budi Asih dengan cara observasi di lapangan, wawancara yang dilakukan dengan informan, dan dokumentasi penunjang keberhasilan implementasi program untuk kemudian dihilangkan kesalahan-kesalahan yang didapat dalam pencatatan yang telah peneliti lakukan berupa penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara ataupun penyuntingan kata-kata yang berasal dari catatan pribadi dari observasi dan lain sebagainya. Tentunya hal ini bersifat mengoreksi agar dapat lanjut kedalam tahapan selanjutnya.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data yakni menemukan keterkaitan informasi dengan pertanyaan atau permasalahan sebelumnya, membandingkan fakta baru

yang ditemukan dengan prediksi awal memperhatikan hubungan antar variabel, mengidentifikasi pola dalam pengamatan, memeriksa pola-pola yang tidak sesuai dengan fakta, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada (Harlen, 2006).

Peneliti telah melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan teknik interpretasi data yakni dengan cara melakukan perbandingan fakta yang ditemukan di UPTD PSAA Budi Asih mengenai implementasi program penanganan anak terlantar dengan prediksi permasalahan awal bahwa terdapatnya kekurangan sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun pada sumber daya peralatan. Peneliti akan mengidentifikasi mengenai implementasi program penanganan anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asih dengan menjuruskannya kedalam teori keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III untuk memperhatikan hubungan antar variabelnya, mengidentifikasi pola dalam pengamatan yang telah dilakukan peneliti, memeriksa pola-pola yang tidak sesuai dengan fakta yang ada berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) analisis data adalah suatu upaya untuk mencari dan memproses penyusunan data dengan terstruktur yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara membagi data ke beberapa kategori, menjabarkan dalam menyusun kedalam pola, memprioritaskan data penting dan data yang hendak dipahami, dan pembentukan kesimpulan agar dapat ditelaah oleh diri sendiri maupun orang lain dengan mudah. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berikut adalah penjabaran mengenai teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini (Miles dan Huberman, 1992) yakni :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu kegiatan analisis data dengan cara memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis menjadi data ataupun gambaran yang jelas agar memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung hingga laporan tersusun.

Peneliti telah melakukan teknik analisis data dengan menggunakan teknik reduksi data yakni dengan cara peneliti melakukan penyederhanaan dari data-data yang telah peneliti peroleh di UPTD PSAA Budi Asih berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang masih “kasar” untuk ditransformasikan menjadi hasil yang sederhana, akurat, dan gambaran yang jelas agar memudahkan peneliti dan tentunya pembaca untuk melihat hasil penelitian peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau display data merupakan teknis analisis data dengan cara mengumpulkan informasi ataupun data setengah jadi yang sudah menjadi gambaran jelas untuk disusun sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorisasikan yang memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui tahap reduksi data untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif, bagan, hubungan antar indikator serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi.

Peneliti telah melakukan teknik analisis data dengan menggunakan teknik penyajian data yakni dengan cara peneliti melakukan penyajian data kedalam bentuk deskriptif yang menjelaskan atau memaparkan indikator-

indikator penunjang pengimplementasian program penanganan anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asih menurut George C. Edward III yakni variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan dalam memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah suatu tahapan analisis penelitian dengan mengusahakan pencarian, pengujian, pengecekan kembali atau pemahaman makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau proposisi dari gambaran suatu objek yang masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

Peneliti telah melakukan teknik analisis data dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan yakni dengan cara peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai hasil penelitian tentang implementasi program penanganan anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asih menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Pengecekan ulang yang dilakukan berupa kesesuaian hasil penelitian yang didapat yang masih remang-remang atau gelap dengan teori agar setelah dilakukannya pengecekan ulang, peneliti dapat menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yakni implementasi program penanganan anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum UPTD PSAA Budi Asih

4.1.1 Sejarah UPTD PSAA Budi Asih

Didirikannya sebuah lembaga yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak terlantar oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1981.

Melalui surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor A1.012/598/B.III/1981, tanggal 1 Maret 1981 tentang permohonan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Lampung perihal Pembentukan Panti Asuhan Yatim Piatu Budi Asih, maka pada tanggal 23 April 1981 telah diterbitkannya surat keputusan Gubernur Lampung Nomor G/070/B.II/HK/81, tentang pembentukan Panti Asuhan Yatim Piatu “Budi Asih” Provinsi Lampung.

Kemudian dalam perkembangannya, Panti Asuhan Yatim Piatu “Budi Asih” Provinsi Lampung, sekarang lebih dikenal sebagai dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak (UPTD PSAA) “Budi Asih” berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2010 berlokasi di jalan Urip Sumoharjo no. 32 Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan menempati areal seluas 4.186 M².

Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 27 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), maka UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan UPTD PSAA Budi Asih

Meninjau pada tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung terdapat visi yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam pelaksanaan tugas dan misi di UPTD PSAA Budi Asih beracu pada visi yang telah dirumuskan.

Berikut adalah visi dan misi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Lampung :

Visi

Yakni ‘Terwujudnya kesetaraan dan kemandirian anak di masyarakat’.

Misi

- Meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu terlantar
- Meningkatkan sumber dan potensi yang ada di dalam panti
- Meningkatkan profesionalisme pekerja sosial dalam memberikan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu terlantar

4.1.3 Tugas dan Fungsi UPTD PSAA Budi Asih

Menurut pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2020 Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas

Sosial Provinsi Lampung Paragraf 1 Tugas dan Fungsi pada pasal 148 diantaranya sebagai berikut :

Tugas

UPTD PSAA Budi Asih mempunyai tugas memberikan pelayanan dan penyantunan, meliputi bimbingan fisik, meliputi, sosial, latihan keterampilan dan resosiasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu

Fungsi

1. Pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial ;
2. Pusat pengembangan kesempatan kerja ;
3. Pusat latihan keterampilan ;
4. Pusat informasi kesejahteraan sosial ;
5. Pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitas dari lembaga rehabilitas lainnya ;
6. Pelaksanaan penyantunan asuhan anak Budi Asih ; dan
7. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

4.1.4 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai UPTD PSAA Budi Asih

Adapun beberapa nama dan struktur jabatan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 2. Nama dan Struktur Jabatan

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Eko Priono, MM	Kepala UPTD PSAA Budi Asih
2	Hodijah, SH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	Riamin Marbun	Staf Sub Bagian Tata Usaha
4	Hartono	Staf Sub Bagian Tata Usaha
5	Lukman Hakim, SE	Kepala Seksi Penyantunan

6	Suhaimi, S.Sos	Staf Seksi Penyantunan
7	Rosidi	Staf Seksi Penyantunan
8	Maryani, S.Sos	Kepala Seksi Pelayanan
9	Siti Purwaningsih, S.Psi	Koordinator Pekerja Sosial/Pekerja Sosial Madya
10	Raysa Hardianti, S.Psi	Pekerja Sosial Pertama
11	Tini	Pekerja Sosial Penyelia

Sumber Tabel 2. : Diolah oleh peneliti, 2023

Adapun susunan organisasi pada UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung yakni :

- a. Kepala UPTD.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Staf Sub Bagian Tata Usaha
 2. Staf Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Seksi Penyantunan, membawahi :
 1. Staf Seksi Penyantunan
 2. Staf Seksi Penyantunan
 - d. Kepala Seksi Pelayanan, membawahi :
 1. Staf Seksi Pelayanan
 2. Staf Seksi Pelayanan
 - e. Koordinator Pekerja Sosial/Pekerja Sosial Madya, membawahi :
 1. Pekerja Sosial Penyelia
 2. Pekerja Sosial Pertama
- 1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2020 pasal 148 ayat (1) huruf

b, dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- 2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

4.2 Gambaran Umum Program Penanganan Anak Terlantar

4.2.1 Landasan Hukum Program Penanganan Anak Terlantar

Pembuatan program penanganan anak terlantar berdasar kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 yang berbunyi : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini diperinci ke dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 pada Bab III tentang Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial terkhusus pada pasal 17 yang berbunyi : (1) Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan/atau LKSA yang ditetapkan oleh gubernur, dan (2) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 diperinci dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 pasal 148 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1) UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih mempunyai tugas memberikan pelayanan dan penyantunan, meliputi bimbingan fisik, meliputi sosial, latihan

keterampilan dan resosiasasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu, dan (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih, mempunyai fungsi :

- a. Pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Pusat pengembangan kesempatan kerja;
- c. Pusat latihan keterampilan;
- d. Pusat informasi kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- f. Pelaksanaan penyantunan asuhan anak Budi Asih; dan
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Adapun landasan hukum pelaksanaan/pelayanan/operasional program penanganan anak terlantar berdasar pada :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung-jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9)
 - Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali (Pasal 10 Ayat 1).

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- c. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak
- d. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1980, Pasal 2
 - Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.
 - Pemerintah dan/atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan anak.
 - Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak

4.2.2 Program Penanganan Anak Terlantar

Dalam program penanganan anak terlantar terdapat 3 sub program dalam pelaksanaannya yakni sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial. Program penanganan anak terlantar ini sudah berlangsung dari berdirinya panti asuhan Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung yakni tahun 1981 sampai sekarang. Pada tahun 2019 dan 2020 yang telah UPTD PSAA Budi Asih dapatkan di tahun 2022, program penanganan anak terlantar sudah berjalan dengan cukup baik walaupun terdapat hambatan dari adanya pandemi *covid-19* yang membuat pelaksanaan dari program

penanganan anak terlantar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut UPTD PSAA Budi Asih, pada tahun 2019 program penanganan anak terlantar terdapat 5 orang lulus di UPTD PSAA Budi Asih dan anak yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 2 orang dan yang berhasil melanjutkan bekerja sebanyak 2 orang. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 7 orang lulus di UPTD PSAA Budi Asih, 2 orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan sebanyak 5 orang yang melanjutkan bekerja. Namun, untuk pada tahun 2021 data yang dihimpun oleh UPTD PSAA Budi Asih belum diperbarui terkait anak-anak yang sudah lulus apakah masuk ke perguruan tinggi ataupun bekerja, untuk saat ini yang baru diketahui untuk anak yang melanjutkan ke pekerjaan sebanyak 6 orang dan yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 3 orang dengan total anak yang lulus sebanyak 20 orang. Akan tetapi, hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian program penanganan anak terlantar pada tahun 2019-2020 terimplementasi dengan baik walaupun pada tahun 2021 belum ada kejelasan lebih lanjut terkait 11 orang anak lainnya. Tentunya hal ini dapat terlihat dari uraian keberhasilan UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung yang berhasil membuat banyaknya anak-anak terlantar yang telah lulus memberdayakan dirinya dengan cara bekerja dan melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus dari UPTD PSAA Budi Asih.

Berikut adalah uraian ataupun isi pelaksanaan dari program penanganan anak terlantar yang dilaksanakan oleh UPTD PSAA Budi Asih selama ini khususnya pada sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial diantaranya sebagai berikut :

4.2.2.1 Sub Program Perlindungan

Pada pelaksanaan sub program perlindungan, pelaksanaan kegiatan oleh UPTD PSAA Budi Asih :

- Melakukan registrasi, assesment sampai terminasi menurut umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Pada poin ini, aparat melakukan pendataan anak terkait umur anak, jenis kelamin anak, tingkat pendidikan anak dari anak yang baru masuk dan menjadi klien hingga terminasi/lulus dari UPTD PSAA Budi Asih.



Gambar 2. Pendataan Anak

Sumber Gambar 2. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2022



Gambar 3. Salah Satu Hasil Pendataan Anak
Sumber Gambar 3. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2022

- Penempatan anak dalam segala penanganan baik dalam assesment, penempatan program baik di dalam maupun di luar panti. Pada poin ini, aparat melakukan assesment melalui metode wawancara terhadap anak agar dapat melaksanakan pendataan terhadap anak untuk ditempatkan ke dalam bentuk penanganan yang tepat sesuai dengan kapasitas ataupun keperluan anak baik di dalam maupun di luar panti UPTD PSAA Budi Asih.



Gambar 4. Pelaksanaan Assesment Minat Bakat
Sumber Gambar 4. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2022

- Menjamin anak terlindungi dari pengaruh negatif baik yang ada dalam panti maupun dari luar panti, menjamin anak terlindungi dari tindak kekerasan baik yang ada di dalam panti maupun dari luar panti, dan menjamin anak bebas dari kegiatan eksploitasi maupun penyalahgunaan anak untuk tujuan tertentu. Pada poin ini, aparat memberikan jaminan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak untuk dijaga secara utuh terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik di dalam ataupun di luar panti.
- Menjamin partisipasi penuh anak dalam berbagai program termasuk pendidikan, dan menjamin Akses bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pada poin ini, aparat memberikan jaminan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan dan akses pendidikan berupa menyekolahkan anak di berbagai sekolah yang sebelumnya telah melakukan kerja sama dengan UPTD PSAA Budi Asih.

No	Nama Anak	Jenis Sekolah	Alamat Sekolah	No. Pendaftaran
1	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
2	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
3	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
4	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
5	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
6	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
7	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
8	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
9	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
10	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
11	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
12	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
13	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
14	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
15	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
16	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
17	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
18	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
19	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
20	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
21	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
22	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
23	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
24	ALYAN MARIUS	SDN 1000001
25	ALYAN MARIUS	SDN 1000001

Gambar 5. Daftar Penempatan Sekolah Anak

Sumber Gambar 5. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2023



Gambar 6. Proses Bimbingan Belajar Primagama

Sumber Gambar 6. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2023

4.2.2.2 Sub Program Pengasuhan

Pelaksanaan sub program pengasuhan di dukung menggunakan sistem asrama. Sistem asrama yang digunakan oleh UPTD PSAA Budi Asih ini diberikan agar pelaksanaan pelayanan oleh aparat maupun pengasuh dapat berjalan sebagaimana mestinya yang berlangsung selama 24 jam. Fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan sistem asrama juga diberikan yakni seperti asrama putra dan asrama putri, ruang makan, tempat menjemur, kamar mandi, ruang belajar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa untuk menetap sebagaimana sistem asrama yang seharusnya dan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku. Anak-anak juga diberikan fasilitas pengasuh sebanyak 3 orang pengasuh agar pelaksanaan pengasuhan dapat tertunjang dan berjalan selama 24 jam.



Gambar 7. Asrama Putra/Putri UPTD PSAA Budi Asih
Sumber Gambar 7. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2023



Gambar 8. Ruang Makan Anak UPTD PSAA Budi Asih
Sumber Gambar 8. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2023



Gambar 9. Ruang Belajar Anak UPTD PSAA Budi Asih
Sumber Gambar 9. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2023



Gambar 10. Tempat Menjemur Pakaian
Sumber Gambar 10. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2023



Gambar 12. Cek Kesehatan Anak

Sumber Gambar 12. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2022

- Bimbingan Sosial, terdiri dari ;

Bimbingan fisik meliputi bimbingan kedisiplinan, bimbingan olahraga dan kesehatan. Pada poin ini, aparat memberikan bimbingan kedisiplinan bagi anak, disertai dengan bimbingan ataupun membiasakan anak dengan melaksanakan olahraga seperti senam agar dapat terjaga kesehatan anak.



Gambar 13. Bimbingan Olahraga Senam

Sumber Gambar 13. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2023

Bimbingan mental keagamaan meliputi tilawatil qur'an, belajar fiqih, tauhid, dan hadist, hafiz qur'an, belajar ceramah, dzikir bersama, bimbingan konsultasi keagamaan, serta solat berjama'ah. Pada poin ini, aparat memberikan bimbingan keagamaan seperti tilawatil qur'an dan lain sebagainya serta menyediakan tenaga ahli keagamaan agar terlaksana secara maksimal.



Gambar 14. Bimbingan Keagamaan

Sumber Gambar 14. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2022

Bimbingan sosial, individu, dan kelompok. Pada poin ini, aparat memberikan bimbingan sosial kepada anak melalui

individu ataupun kelompok. Hal ini dilakukan berupa bimbingan konseling terhadap anak



Gambar 15. Bimbingan Sosial melalui Bimbingan Konseling

Sumber Gambar 15. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2022

Keterampilan kerja meliputi seni hadroh, ketrampilan hidroponik, dan lain sebagainya. Pada poin ini, aparat memberikan keterampilan kerja terhadap anak agar pengisian waktu luang mereka dapat terisi dengan kegiatan manfaat. Hal ini juga agar anak dapat mengetahui dunia pekerjaan, siap apabila diharuskan bekerja setelah lulus dari UPTD PSAA Budi Asih, dan sebagai wawasan anak mengenai dunia pekerjaan.



Gambar 16. Keterampilan Kerja Menjahit

Sumber Gambar 16. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2020



Gambar 17. Keterampilan Kerja Hidroponik

Sumber Gambar 17. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2021



Gambar 18. Keterampilan Kerja Otomotif

Sumber Gambar 18. : UPTD PSAA Budi Asih Tahun 2022

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan terkait implementasi program penanganan anak terlantar dengan 3 sub program di dalamnya yakni sub program perlindungan, sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial yang dilakukan UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung apabila meninjau pada teori keberhasilan implementasi menurut George C. Edward III yakni pada indikator komunikasi, disposisi, dan stuktur birokrasi pada program penanganan anak terlantar sudah terimplementasi dengan baik walaupun terdapat faktor-faktor hambatan maupun kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun, pada indikator sumber daya, implementasi program penanganan anak terlantar terimplementasi dengan kurang baik sesuai dengan hasil analisis yang telah peneliti lakukan/temukan di lapangan penelitian.

Secara keseluruhan terkait keberhasilan implementasi menurut George C. Edward III terhadap pelaksanaan implementasi program penanganan anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asih Dinas Sosial Provinsi Lampung telah terimplementasi dengan baik walaupun terdapat faktor penghambat dan kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah peneliti paparkan, maka saran yang dapat berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung

Bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung selaku induk ataupun pusat dari UPTD PSAA Budi Asih bahwasannya perlunya peninjauan ulang mengenai : 1) mengenai pengadaan barang yang telah dimiliki uptd-uptd yang ada termasuk UPTD PSAA Budi Asih karena banyaknya barang yang terdapat kekurangan seperti tidak memadainya tempat menjemur, tidak memadainya ruang makan dan alat makan untuk klien/anak sebanyak 50 orang, banyaknya barang yang sudah lapuk atau keropos seperti jendela, kursi, meja, kurangnya pengadaan barang komputer dan printer sebagai pemenuhan pendataan anak agar tidak terjadinya penghambatan dan lain sebagainya, 2) mengenai dalam pengalokasian sumber daya manusia yakni aparatur sipil negara yang dimiliki uptd-uptd yang ada seperti UPTD PSAA Budi Asih yang membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk membantu melaksanakan program penanganan anak terlantar agar maksimal, tidak terjadinya penumpukan tugas implementor program, dan terdapat beberapa pegawai yang khusus menjalankan sub program perlindungan. Tentunya hal ini juga berlaku pada sub program pengasuhan, dan sub program pelayanan sosial, serta 3) mengenai anggaran yang ada pada uptd-uptd yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Lampung agar kurangnya anggaran transportasi dan anggaran makanan anak seperti di UPTD PSAA Budi Asih dapat terantisipasi dan dapat memberikan pemenuhan kesejahteraan anak secara maksimal.

2. Bagi UPTD PSAA Budi Asih

Bagi implementor program penanganan anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asih harus dapat memberikan sosialisasi mengenai program penanganan anak terlantar melalui media elektronik seperti *platform instagram, facebook, twitter, youtube*, dan lain sebagainya. Mengingat perkembangan zaman sudah menggunakan media elektronik sebagai konsumsi keseharian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Alfani, Mufti Hasan. (2018). Analisis Pengaruh *Quality of Work Life (QWL)* Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Karyawan PT. Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru. Riau : Universitas Islam Riau. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Volume 1 Nomor 1.
- Alwasilah, Chaedar. (2008). *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Anderson, James E. (1979). *Public Policy Making*. New York : Holt Rinchard dan Winston.
- Andriati, Lina Fitri. (2011). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Rangka Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan. Malang : Universitas Brawijaya
- Assegaf, S. Lubna. (2014). *Pola Pengasuhan Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Baidowi, Ahmad. (2020). Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19. Jakarta : STAIP Thalib Jakarta. *Jambura Journal of Educational Management*. Volume 1 Nomor 2.
- Dinas Sosial Provinsi Lampung. (2022). *Populasi Anak Terlantar di Lampung yang Terserap dan Tidak Terserap Instansi*. Bandar Lampung : Lampung.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi ke-II)*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dunn, William N. (2009). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi ke-III)*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Firdiyansyah, Indra. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Warung Gubrak Kepri Mall Kota Batam. Batam : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo. *Jurnal Elektronik REKAMAN* Volume 1 Nomor 1.
- Gerston, LN. (1992). *Public Policy Making in Democratik Society: A Guide to Civic Engagement*. New York : M.E. Sharp, Inc.

- Harlen, W.(2006). *Assessing for Learning Facilitator's Guide, Workshop II: Assessing Process Skills*. San Francisco : Exploratorium.
- Leo, A. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mar'atusholihah, Herlinda., Priyanto, Wawan., dan Aries Tika Damayanti. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan. Semarang : Universitas PGRI Semarang. *Jurnal Mimbar PGSD Undiksha* Volume 7 Nomor 3.
- Miles, MB., dan Huberman, AM. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : *UI Press*.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan *Smart City* di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 14 Nomor 1.
- Nasirin, Chairun. (2013). Program Pemberdayaan Anak-Anak Terlantar di Nusa Tenggara Barat. Mataram : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 15 Nomor 3.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Bahasa.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Gramedia.
- Nurdin, Asrul. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar*. Makassar : Universitas Hasanuddin
- Peraturan Gubernur Lampung nomor 10 tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- Permatasari, A. (2022). Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Bandung : Universitas Nurtanio. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Volume 16 Nomor 2.
- Prakoso, Gumilang Rianto., Siswoyo, Mukarto., dan Moh. Sutarjo. (2013). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Cirebon (Studi Kasus di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon). Cirebon : UGJ. *Jurnal Ilmiah Publika*.
- Prasetya, Agung. (2021). Efektivitas Komunikasi Pemasaran Iklan di Produk Cetak dan Produk *Online* Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika UIN Sumut. Medan : UIN Sumut. *Jurnal Komunika* Volume 17 Nomor 2.

- Ramadhan, Rizki Rahadian. (2014). Implementasi Peraturan Pemerintah Pemerintah Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Anak Jalanan Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 2 Nomor 2, 2151-2160.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11 (1), 1-12.
- Reza, Mohammad. (2016). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Palu : Universitas Tadulako. *Jurnal Katalogis* Volume 4 Nomor 6.
- Santosa, Amir. (1993). Analisis Kebijaksanaan Publik ; Suatu Pengantar. *Jurnal Ilmu Politik* No. 3. Jakarta : Gramedia.
- Subagiyo, Rokhmat. (2017). Konsep Dasar Penelitian Ekonomi Syariah. Jakarta : Alim's *Publishing*.
- Subarsono, AG. (2013). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. (2013). Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Ulya, Zulfa Himmatul. (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Kudus. *Undergraduate thesis* : IAIN KUDUS
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UPTD PSAA Budi Asih. (2021). Buku Saku UPTD PSAA Budi Asih. Bandar Lampung : Lampung.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2007). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Press.
- Wulandari, Tri. (2016). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Remaja di BNPP DIY. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 5* Volume 5 Tahun 2016.
- Zuliyani, Ani., Rahman, Maman., dan Tijan. (2015). Implementasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Anak "Gratama" Semarang. *Unnes Civic Education Journal* Volume 1 Nomor 1.